

## PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA LANSUNG

**Aris Rahmat**

*Ariz.rahmat92@gmail.com*

**Nur Handayani**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research is aimed to prove empirically the influence of Local Own Sources Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) to the Direct Expenditure Allocation at Districts / Cities in Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang and Sumenep which are located in East Java. The population and samples are 6 governments of districts and cities in East Java. The period of sample observation is from 2010 until 2014. The research method has been conducted by using quantitative research and the secondary data collection technique. The data has been collected by using documentation method and it has been carried out by collecting, recording and calculating the data which are related to the research which have been done by using census method and then collecting six population of Districts/Cities i.e. Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. The research object has been done by using the document of the realization report of Regional Government Budget of districts / cities of Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep and it has been obtained from the official sites of Directorate General of Local Government Financial Balance in the internet from 2010 to 2014. The data analysis technique has been carried out by using descriptive statistic, classic assumption test, regressions equation, and hypothesis test which consist of value of coefficient determination, statistic F value and t statistic value. The result of this research shows that Local Own-Source (PAD), General Allocation Fund (DAU), has significant and positive influence to the Direct Expenditure Allocation. Meanwhile, Special Allocation Fund (DAK) does not have any significant and positive influence to the Direct Expenditure Allocation.*

*Keywords: Local Own-Sources (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK), Direct Expenditure Allocation.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Lansung pada Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep yang berada di Jawa Timur. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 6 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dengan periode pengamatan sampel dari tahun 2010 hingga 2014. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian menggunakan metode sensus dengan mengambil enam populasi yaitu Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Obyek penelitian yang digunakan adalah dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet tahun 2010 sampai dengan 2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, persamaan regresi dan uji hipotesis yang terdiri dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Lansung. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Lansung.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Lansung Daerah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Bastian (2006: 338) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Menurut Mardiasmo (2002: 24) Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan merencanakan anggaran keuangannya sendiri serta membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya. Hal ini dapat memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya pembangunan didaerah secara optimal, tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan begitu, setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah lainnya (Bastian, 2006: 356).

Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar pada daerah untuk mengurus daerahnya. Ini adalah kondisi yang bertolak belakang jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Saat itu, peranan pusat begitu dominan dalam pengelolaan daerah. Daerah tidak diberi kewenangan yang memadai untuk mengembangkan dan memajukan potensi yang sesuai dengan kemampuan dan kehendak masyarakat lokal dan seluruh stakeholder daerah. Dominasi pemerintah pusat ketika itu berwujud dalam berbagai pendekatan pembangunan daerah yang sentralistik sehingga mematikan inisiatif dan kreatifitas daerah. Kebijakan daerah lebih banyak ditentukan pemerintah pusat (Yuwono *et al.*, 2005: 51).

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya masing-masing. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Masalah timbul seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah pusat untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Akan tetapi, kewenangan tersebut memiliki konsekuensi bahwa daerah harus mampu

menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan publik.

Penelitian tentang belanja daerah di pemerintah daerah telah banyak dilakukan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitarini (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan dengan catatan Belanja modal merupakan bagian dari Belanja Langsung berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep)".

## TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Anggaran Daerah

Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga anggaran yang mempunyai posisi yang sangat penting. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi (Yuwono *et al.*, 2005: 27). Menurut Mardiasmo (2002: 62) Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran daerah adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai belanja daerah dalam periode waktu tertentu.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah untuk menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Anggaran berfungsi sebagai berikut : 1) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja; 2) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antaratas serta bawahan; 3) Anggaran sebagai pengendalian unit kerja; 4) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai : 1) Arah program ekonomi dalam eksplorasi sumber daya; 2) Menciptakan keseimbangan makro ekonomi; 3) Distribusi sumber daya secara merata; 4) Anggaran harus diorganisasi, sehingga dapat terukur dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Fungsi ekonomi harus mempunyai korelasi dengan perencanaan pembangunan, membantu bank sentral untuk mengukur dampak kebijakan kredit dan keuangan, dan juga memfasilitasi manajemen pemerintah dengan keseimbangan antara kas dan manajemen.

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Peranan anggaran dan hubungannya dalam proses manajemen dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Membuat kebijakan dan perencanaan; 2) Menentukan pendapatan dan pengeluaran; 3) Mengotorisasi pengeluaran yang akan datang; 4) Menyediakan dasar pengawasan pendapatan dan pengeluaran; 5) Koordinasi aktifitas dari fungsi organisasi; 6) Memotivasi manager dan pengusaha; 7) Menyiapkan standar untuk evaluasi pekerjaan.

### **Belanja Lansung**

APBD mencerminkan komitmen kongkret Pemerintah Daerah terhadap pilihan kebijakan pembangunan sektor maupun program. Program yang menjadi prioritas otomatis akan menerima alokasi anggaran yang lebih dibandingkan dengan program yang bukan merupakan prioritas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Belanja lansung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Karakteristik belanja lansung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Kelompok belanja lansung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : 1) Belanja pegawai merupakan belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah; 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; 3) Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Siregar dan Siregar (2001: 395) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

#### **2. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Siregar dan Siregar (2001: 396) menyatakan bahwa undang-undang mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah. Bagi daerah, BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan.

### **4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut : 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas; 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

### **Dana Alokasi Khusus**

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan tertentu (Siregar dan Siregar, 2001: 395). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Lansung**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, hal ini menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut telah mandiri.

Penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap

Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal kabupaten Pacitan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Susilawati (2013) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah (Studi Pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja langsung daerahnya juga semakin tinggi.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Lansung**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari dana perimbangan antar tingkat pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi, terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Susilawati (2013) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah (Studi Pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum (DAU) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja langsung daerahnya juga semakin tinggi.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Lansung**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Lansung**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi

kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, hal ini menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut telah mandiri.

Penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal kabupaten Pacitan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Susilawati (2013) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah (Studi Pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja langsung daerahnya juga semakin tinggi.

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu:

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Lansung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Lansung**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari dana perimbangan antar tingkat pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan.

Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi, terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Susilawati (2013) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah (Studi Pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum (DAU) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja langsung daerahnya juga semakin tinggi.

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanja langsung maupun tidak langsung. Dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin sedikit Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh daerah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketergantungan daerah tersebut dalam memenuhi belanja daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu signifikan. Dengan demikian hipotesis kedua adalah ::

H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Lansung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Lansung**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Puspitarini (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal kota kabupaten Pacitan. Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah daerah maka alokasi belanja daerah juga semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis ketiga adalah : :

H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Lansung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Penulis memperoleh data mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU), dan Belanja Daerah dari website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) untuk periode tahun 2010 - 2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak lain. Metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Independen**

##### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya secara independen. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi tolak ukur kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang - Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang sah terdiri dari : 1) Hasil Pajak Daerah; 2) Hasil Retribusi Daerah; 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari : 1) Sumbangan dari pemerintah; 2) Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan; 3) Pendapatan lain-lain yang sah.



### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan.

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN kepada provinsi/kota/kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang.

### **Variabel Dependen**

#### **Belanja Lansung**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a) Belanja pegawai merupakan belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah; b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; c) Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

### **Teknik Analisa Data**

Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisa data yang mengolah atau menganalisis data yang berbentuk angka atau bilangan dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Alokasi Belanja Daerah.

### Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui dan menguji kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel bebas. Tujuan uji asumsi klasik adalah agar dapat menghasilkan nilai parameter yang baik sehingga hasil penelitian dapat lebih diandalkan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$BL = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Keterangan :

BL	: Belanja Lansung (BL)
$\alpha$	: Konstanta
$\beta$	: Slope atau koefisien regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU	: Dana Alokasi Umum (DAU)
DAK	: Dana Alokasi Khusus (DAK)
$e$	: <i>error</i>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan proses pengolahan data, ternyata data yang diolah memiliki selisih yang cukup jauh sehingga menyebabkan data menjadi tidak normal. Maka dari itu peneliti melakukan transformasi data menjadi bentuk Logaritma Natural (LN). Logaritma Natural adalah logaritma berbasis  $e$  dimana  $e$  adalah 2.718281828459...(dan seterusnya). Logaritma Natural terdefiniskan untuk semua bilangan real positif  $x$  dan dapat juga didefinisikan untuk bilangan kompleks yang bukan 0.

### Statistik Deskriptif

Santoso (2000) dalam Kuncoro (2011: 38) Statistik deskriptif adalah: pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik; kedua, meringkas dan menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi, dan bentuk. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Lansung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep di Jawa Timur Tahun 2010 – 2014, maka hasil SPSS tentang statistik deskriptif yang meliputi minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1  
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ln_BL	30	12,26	15,30	13,3425	,84160
ln_PAD	30	10,50	14,84	11,9619	1,33471
ln_DAU	30	13,07	13,96	13,4283	,22497
ln_DAK	30	9,86	11,57	10,8849	,48972
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa Rata-rata Belanja Lansung yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep selama lima tahun sebesar 13,3425 %. Belanja Lansung memiliki standart deviasi sebesar 0,84160 lebih kecil dari nilai rata-rata 13,3425. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep selama lima tahun sebesar 11,9619. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai standard deviasi sebesar 1,33471 lebih kecil dari nilai rata-rata 11,9619. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

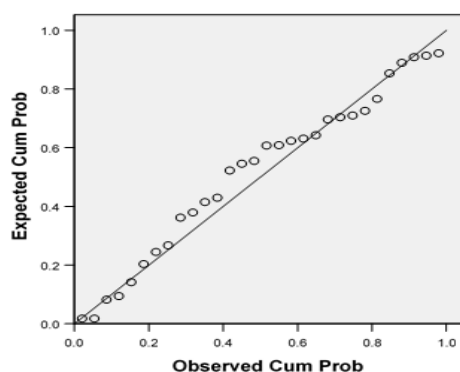
Rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama lima tahun sebesar 13,4283. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,22497 lebih kecil dari nilai rata-rata 13,4283. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama lima tahun sebesar 10,8849. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,48972. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Pada prinsipnya normalitas dapat di deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal dimana grafiknya mengikuti garis diagonal. Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan "Normal P-P Plot" dan "Tabel Kolmogorov Smirnov".



Gambar 1  
Grafik Normal P-P Plot  
Sumber: Hasil Output SPSS

Dari grafik histogram yang terdapat pada gambar 1 tampak bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Dengan demikian maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan. Untuk memperkuat kesimpulan pengujian distribusi normal dengan menggunakan uji statistik yaitu uji Kolmogorov-Smirnov.

**Tabel 2**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,30799223
Most Extreme Differences	Absolute	,123
	Positive	,067
	Negative	-,123
Kolmogorov-Smirnov Z		,675
Asymp. Sig. (2-tailed)		,752

Sumber: Hasil Output SPSS

Pada tabel 2 tersaji bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,752 dan tidak signifikan pada alpha 0,05. Nilai P = 0,752 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Hasil ini konsisten dengan hasil uji grafik bahwa residual terdistribusi secara normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Menurut Kuncoro (2011; 125) multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan model regresi dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika nilai *tolerance* value dibawah 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) melebihi 10 berarti terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients(a)**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Ln_PAD	,498	2,008	Bebas Multikolinieritas
Ln_DAU	,575	1,738	Bebas Multikolinieritas
Ln_DAK	,818	1,222	Bebas Multikolinieritas

a. Dependent Variable: BL

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari hasil pengujian yang tersaji pada tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU dan DAK tidak ada yang memiliki nilai tolerance yang kurang dari 0,1. Selain itu juga diketahui bahwa dari masing-masing nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) pada variabel independen PAD, DAU dan DAK tidak terdapat nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) yang lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

### Hasil Uji Autokorelasi

Hanke dan Reitsch (1998) dalam Kuncoro (2011: 115) autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Apabila nilai DW lebih besar daripada batas atas, maka tidak ada autokorelasi positif. Apabila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah, maka terdapat autokorelasi positif. Apabila nilai DW terletak diantara batas atas dan batas bawah, maka tidak dapat disimpulkan.

**Tabel 4**  
**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,931(a)	,866	,851	,32528	2,341

a Predictors: (Constant),PAD,DAU,DAK

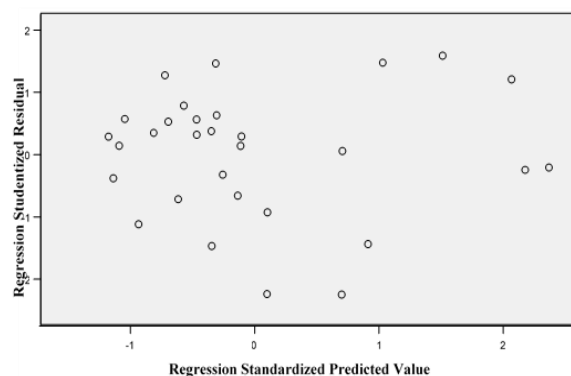
b Dependent Variable: BL

Sumber: Hasil Output SPSS.

Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4 tersebut diketahui nilai Durbin Watson adalah sebesar 2,341 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel, yang diperoleh dari nilai signifikansi 5% jumlah sampel 30(n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3) dengan hasil nilai tabel Durbin Watson untuk dL 1,2138 dan dU 1,6498. Karena nilai DW lebih besar dari dU maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Hanke dan Reitsch (1998) dalam Kuncoro (2011: 118) heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dengan kata lain pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dalam pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplot*.



**Gambar 2**  
**Grafik Scatterplot**  
**Sumber: Hasil Output SPSS**

Berdasarkan grafik *Scatterplot* yang tersaji pada gambar 2 terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi.

**Uji Hipotesis**

**Persamaan Regresi**

Dari hasil pengolahan SPSS, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$BL = -5,781 + 0,477 PAD + 0,955 DAU + 0,054 DAK$$

**Tabel 5**  
**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,931(a)	,866	,851	,32528

a Predictors: (Constant),PAD,DAU,DAK

b Dependent Variable: BL

Sumber: Hasil Output SPSS.

Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *R Square* sebesar 0,866 hal ini berarti bahwa 86,6% variasi Belanja Lansung dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan sisanya 13,4% dijelaskan oleh sebab lain diluar model.

**Tabel 6**  
**ANOVA(b)**

Model	Sum of Squares	DF	Mean Square	F	Sig.
Regression	17,790	3	5,930	56,04	,000(a)
Residual	2,751	26	,106		
Total	20,540	29			

a Predictors: (Constant),PAD,DAU,DAK

b Dependent Variable: BL

Sumber: Hasil Output SPSS.

Dari uji ANOVA atau F-test pada tabel 6, diperoleh F-hitung 56,045 dengan p value sebesar 0,000 dan nilai F-tabel 2,98. Karena nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai p value lebih kecil daripada alpha 0,05 maka model regresi ini bisa dipakai untuk menjelaskan Belanja Lansung Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Lansung

**Tabel 7**  
**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,781	4,541		-1,273	,214
	ln_PAD	,477	,064	,757	7,442	,000
	ln_DAU	,955	,354	,255	2,698	,012
	ln_DAK	,054	,136	,032	,398	,694

a Predictors: (Constant),PAD,DAU,DAK

b Dependent Variable: BL

Sumber: Hasil Output SPSS.

Berdasarkan tabel 7 output regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki t hitung 7,442> dari t tabel 1,706 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal, dan dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Lansung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Pemerintah Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep sangat bergantung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun.

Berdasarkan tabel 7 output regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki  $t$  hitung 2,698 > dari  $t$  tabel 1,706 dan nilai signifikan  $0,012 < 0,05$ . sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung, dan dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Pemerintah Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep sangat bergantung terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun.

Berdasarkan tabel 7 output regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki  $t$  hitung 0,398 < dari  $t$  tabel 1,660 dan nilai signifikan  $0,694 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) secara individual tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal, dan dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. tidak bergantung terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun. Hal ini dapat disebabkan karena Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep sudah dapat memenuhi kebutuhan Belanja Langsungnya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian dari masing - masing variabel dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga akan semakin tinggi. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi tolak ukur kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanja langsung maupun tidak langsung. Dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin sedikit Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh daerah tersebut maka ketergantungan daerah tersebut dalam memenuhi belanja daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu signifikan; 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Surabaya, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep tidak bergantung terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota Surabaya,

Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sampang dan Sumenep sudah dapat memenuhi kebutuhan Belanja Lansungnya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang sifatnya khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain : (1) Untuk dapat meningkatkan alokasi belanja daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sampel selain kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. (3) Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambahkan variabel independen yang lainnya baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makro ekonomi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, O. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Lansung. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Fatmawati, S. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Langsung. *Disertasi*. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Hidayati, N. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Kuncoro, M. 2011. *Metode Kuantitatif*. Edisi Keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Puspitarini, P. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Rahmawati, Dan Nur. I. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Skripsi Sarjana*. Fakultas Ekonomi Diponegoro: Semarang.
- Sari, N.P. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Lansung Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Riau. <http://kampoengakuntansi.blogspot.com>. Diakses tanggal 23 September 2014.



- Setiawan, A. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Siregar B. dan B. Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Sulistiyowati, D. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Susilawati. E. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Lansung Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- Mala, Khoirul Lilik, 2008. *Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Universitas Islam Sultan Agung. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Meianto, E. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Disertasi*. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Multi Data. Palembang.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Puspitarini, P. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Setiawan, A. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Siregar B. dan B. Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Walpole, R.E. 1995. *Pengantar Statistika*. Edisi Ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Yovita, F.M. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Yuwono, S., T.A. Indrajaya, dan Hariyandi. *Penganggaran Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Bayumedia Publishing. Malang.